

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

- A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2013.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Fisher, Roger, William L. Ury, dan Bruce Patton, *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*, Penguin, 2011.
- Fleming, Sean, *Leviathan on a Leash: A Theory of State Responsibility*, Princeton University Press, 2020.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2000.
- Isnaini dan Anggraeni A. Lubis, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, 2022.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Citra Media, Yogyakarta, 2007.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.

Rasjidi, Lili dan Sidharta, B. Arief, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2016.

Sumardjono, Maria S.W., *Mediasi Sengketa Tanah*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

2) Karya Ilmiah/Jurnal

Handayani, Andi Amalia, Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Notarius*, Volume 12 No. 1, (2019). hlm. 537-549.

Hansun, Morrets Hendro, Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah. *Lex Administratum*, Volume 4 No. 1 (2016), hlm. 145-153.

Istiana, Nanik Sutarni, dan Burham Pranawa. Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, Volume 6 No. 1, (2022), hlm. 33-34.

Kasenda, Dekie GG, Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2 (2017). hlm 122-141.

Kusuma, Marliyanti Praja, 2022, *Disertasi : Perlindungan Hukum Untuk Pemenang Lelang hak Tanggungan Terhadap Peralihan Sertipikat hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo)*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 1-24.

Manik, Herlina, Sertipikasi Hak Atas Tanah Ukm Untuk Peningkatan Akses Permodalan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1 (2016). hlm. 106-121.

Maulani, Azmi, 2023, *Skripsi; Tinjauan Yuridis terhadap Pemblokiran Sertifikat di Kantor Pertanahan Deli Serdang*, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang. hlm. 1-103.

Monalisa Ulfah, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertifikat Ganda. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 3 No. 3, (2022), hlm. 327-352.

Oloan, Nur, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah, *Warta Dharmawangsa*, Volume 50 (2016). hlm. 5.

- Prabandari, Luh Nyoman Diah Sri, I. Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani, Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 No. 1 (2021), hlm 1-5.
- Rejekiningsih, Triana, Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 2 (2016). hlm 298-325.
- Saranani, Abdul Mutalib, Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Volume 1, No. 3 (2022). hlm. 173-184.
- Sekarsari, Anisa, Haryo Budhiawan, dan Akur Nurasa, Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Dan Bantul). *Tunas Agraria*, Volume 2 No. 2 (2019). hlm. 117-135.
- Sirait, San Yuan, Muhammad Nazer, and Busyra Azheri, Sertifikasi tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap: Deskripsi dan manfaatnya. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Volume 6 No. 2 (2020). hlm. 236-248.
- Subekti, Rahayu, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 2 (2016). hlm. 376-394.
- Surayya, Ita, Idiologi Hukum Pendaftaran Tanah dalam Sistem Hukum Agraria. *Jatiswara*, Volume 35 No. 1 (2020). hlm. 43-44.
- Syuryani, Syuryani, dan Nessa Fajriyana Farda, Pemblokiran Sertipikat Tanah Dikantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita. *Menara Ilmu*, Volume 15 No. 2 (2021). hlm. 72-83.
- Syuryani, Syuryani, dan Yozi ardian, Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Untuk Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 6 No. 2, (2023). hlm. 268-280.
- Taqiyyah, Maya Anas, and Atik Winanti, Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Volume 5 No. 1 (2020), hlm. 77-93.

Temaluru, Hermanus Marang, dan Benediktus Peter Lay, Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, Volume 1 No. 3 (2023). hlm. 292-307.

Wulansari, Ditya Putri, dan Pahlefi Pahlefi, Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Volume 1 No. 3 (2020). hlm. 489-499.

3) Peraturan Perundang-undangan

-----, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

-----, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruangbadan Pertanahan Nasional.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.

-----, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/PDT/2020/PT JMB.

-----, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XI/2013.

-----, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

4) Internet

Anonim, Pengertian Populasi, <http://definisipengertian.net/>. Diakses tanggal 27 Februari 2024 pukul 18.37 WIB.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah, <https://jdih.maritim.go.id/infografis/pemberian-ganti-kerugian-pembebasan-kepemilikan-hak-atas-tanah>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 17.10 WIB.